

**EVALUASI PENDIDIKAN POLITIK KPPI DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

NADIYAH INDRIYANI

NPM 2156041002



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

EVALUASI PENDIDIKAN POLITIK KPPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NADIYAH INDRIYANI

Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, khususnya di lembaga legislatif, masih tergolong rendah dan belum mencapai target kuota 30% yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan data tahun 2023, keterwakilan perempuan Indonesia berada pada angka 21,6% dan Provinsi Lampung hanya mencapai 18,82%, menempatkannya di urutan ke-19 secara nasional. Rendahnya angka ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain stereotip bahwa politik adalah ranah laki-laki, rendahnya tingkat pendidikan politik perempuan, minimnya dukungan partai politik, serta penempatan calon legislatif perempuan yang cenderung hanya untuk memenuhi kuota. Akibatnya, aspirasi dan kepentingan perempuan belum terakomodasi secara optimal dalam kebijakan publik. Pendidikan politik menjadi strategi kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui pendidikan politik yang efektif, perempuan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan politik oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung menggunakan teori evaluasi William Dunn, yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan politik KPPI menjadi salah satu faktor dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepercayaan diri perempuan dalam berpartisipasi politik, namun pelaksanaannya masih cenderung bersifat periodik, terutama menjelang pemilu, dan belum menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Perempuan, Keterwakilan Perempuan.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE KPPI'S POLITICAL EDUCATION IN INCREASING WOMEN'S PARTICIPATION IN LAMPUNG PROVINCE

By

NADIYAH INDRIYANI

Women's political representation in Indonesia, particularly within legislative bodies, remains relatively low and has yet to reach the 30% quota mandated by Law No. 7 of 2017 on General Elections. According to 2023 data, women's representation in Indonesia stands at 21.6%, while Lampung Province records only 18.82%, ranking 19th nationally. This low percentage is attributable to several factors, including the stereotype that politics is a male domain, the generally lower educational attainment among women, the limited support from political parties, and the tendency to nominate female legislative candidates merely to fulfill the quota requirement. As a result, women's aspirations and interests are not yet optimally accommodated in public policy. Political education serves as a key strategy to address this issue. Through effective political education, women can acquire the knowledge, skills, and confidence necessary to participate actively in political processes. This study aims to evaluate the implementation of political education by the Women's Political Caucus of Indonesia of Lampung Province, using William Dunn's evaluation framework, which includes the dimension of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research adopts a qualitative descriptive method, employing interviews and documentation. The findings indicate that KPPI's political education programs has contributed on improving women's knowledge, awareness, and confidence in political participation. However, their implementation remains largely periodic particularly in the lead-up to elections and has yet to reach all segments of society equally.

Keywords: *Political Education, Women's Political Participation, Women Representation.*

**EVALUASI PENDIDIKAN POLITIK KPPI DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

NADIYAH INDRIYANI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**Judul Skripsi : EVALUASI PENDIDIKAN POLITIK KPPI
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Nadiyah Indriyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2156041002

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

NIP. 196911032001121002

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

NIP. 198807122019031012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 197009142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Oktober 2025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadiyah Indriyani, lahir di Depok pada tanggal 14 Oktober 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak R. Indra Bonar Suryono dan Ibu Saripah, yang berdomisili di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari jenjang persekolahan di TK & Playgroup Kreatif Primagama, yang diselesaikan pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 12 Pamulang dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 22 Pamulang yang diselesaikan pada tahun 2018. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, yang berhasil lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama masa studi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, khususnya sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan tergabung dalam Bidang Dana dan Usaha.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Rum: 60)

“Don’t be Blue. There is Another Future Waiting There for You”

(Tame Impala)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin.

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang memberikan Rahmat, taufik, serta hidayah Nya yang alhamdulillah sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaat beliau diakhir zaman kelak Aamiin Ya rabbal' amin. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan cinta tulus kepada

Ayahanda R. Indra Bonar Suryono dan Ibunda Saripah

Terim kasih yang tiada terhingga atas kasih sayamg, doa yang tak pernah putus, serta segala pengorbanan dan dukungan yang tulus sepanjang perjalanan hidupku. Segala pencapaian ini takkan pernah terwujud tanpa restu dan bimbingan kalian. Semogga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan di dunia maupun akhirat untuk Ayah dan Ibu tercinta. Aamiin.

Adikku yang aku cintai, Budiono

Terima kasih atas segala semangat dan perhatian yang tak henti-hentinya kau berikan. Semoga segala kebaikanmu dibalas berkali lipat oleh Allah SWT.

Aamiin.

SANWANCANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang Alhamdulillah sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pendidikan Politik KPPI dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Provinsi Lampung” Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaat beliau di akhir zaman, Aamiin Ya Rabbal Alamiin. Terkait dengan penulisan tugas akhir ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala perlindungan, kemudahan, kekuatan, dan kelancaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Segala proses yang telah dilalui menjadi bukti bahwa pertolongan Allah selalu hadir dalam setiap langkah.
2. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas ilmu, arahan, dan bimbingan yang Prof berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, perhatian, dan keikhlasan Prof dalam membimbing menjadi cahaya penerang di tengah kebuntuan. Terima kasih telah menjadi sosok panutan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga hangat dan bijak dalam mendampingi mahasiswa.
3. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Ucapan terima kasih yang penulis sampaikan sedalam-dalamnya atas segala arahan, bimbingan, dan kesabaran Bapak selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang bapak luangkan di tengah kesibukan, untuk membaca, mengoreksi, dan memberikan masukan yang begitu berharga. Setiap saran yang Bapak berikan tidak hanya memperkaya isi dan kedalaman analisis

skripsi ini, tetapi juga membuka wawasan penulis untuk berpikir lebih kritis dan sistematis.

4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Penguji. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang penulis sampaikan sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, serta saran dan kritik yang telah Ibu berikan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah Ibu berikan menjadi berkat dan damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai Ibu.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA). Ucapan terima kasih yang penulis sampaikan kepada Ibu atas segala bimbingan, ilmu, saran, dan masukan yang telah diberikan. Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan studi. Semoga Ibu selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan, serta terus menjadi pribadi yang menginspirasi seluruh mahasiswa.
6. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama proses pengurusan persyaratan hingga selesainya penelitian ini. Semoga Ibu dan Keluarga selalu dalam lindungan Tuhan, serta diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan keberkatan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kedepannya.
7. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, dedikasi, dan ketulusan dalam membimbing selama masa studi penulis sebagai mahasiswa. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi beka berharga bagi penulis dan teman-teman mahasiswa yang menghadapi kehidupan di masa depan, serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
8. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas kerja keras, bantuan dan

pelayanannya yang sangat membantu penulis selama menjadi mahasiswa Administrasi Negara.

9. Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Bapak R. Indra Bonar Suryono dan Ibu Saripah atas segala pengorbanan dan dukungan yang tiada henti. Tidak ada kata yang mampu mewakili besarnya rasa terima kasihku kepada kedua orang tuaku. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, doa, serta pendampingan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup penulis. Terima kasih telah menjadi tempat bersandandalam suka dan duka, serta memberikan kekuatan di saat penulis hampir menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai dan bersyukur atas kepercayaan Bapak dan Ibu, meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki, kesehatan, dan umur panjang kepada Bapak dan Ibu, serta memperkenankan kalian menyaksikan keberhasilan penulis, baik di dunia maupun di akhirat sebagai putri sulung yang kalian cintai. Terima Kasih dari lubuk hati terdalam.
10. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada adik tercinta Budiono atas segala perhatian, kebaikan, dukungan, dan bantuan yang tak pernah henti diberikan dengan penuh keikhlasan demi tercapainya cita-cita kakak untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menjadi adik, sahabat, dan pelindung yang tak tergantikan. Semoga Budi senantiasa dianugerahi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan dan perkuliahannya oleh Allah SWT.
11. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman saya Salshabilla Renasya Namira Putri Gafur, Aurel Neysa Kinanti, serta Syafina Rahmadanti, yang tak hanya hadir sebagai sahabat tetapi juga menjadi penyemangat, pendukung, dan pengingat setia dalam proses ini. Dorongan “Cepat Pulang” dan perhatiannya membuatku tetap fokus dan kuat untuk menyelesaikan skripsi penulis. Tidak hanya sebagai rumah, tetapi kehadiran kalian sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis, canda tawa, sedih, marah, semangat, dan support semua yang telah kita lalui bersama. Semoga kebaikan

kalian dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang berlipat di setiap langkah hidup kalian dan selalu senantiasa di kelilingi dengan hal-hal baik. Terima kasih telah terus menjadi sahabat yang sudah selalu menemani selama 10 tahun ini, kalian sangat berarti bagi penulis.

12. Terima kasih yang tulus saya sampaikan secara khusus kepada Alvina Hamdiani sebagai sahabat yang menjadi bagian penting selama perjalanan hidup penulis, terutama saat dimulainya pengerjaan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya kepada Vina, yang selalu menemani, mendengarkan, memberikan nasehat, dan mendukung penulis baik dalam kesedihan, kebingungan, dan kebahagiaan dalam hidup maupun proses skripsi penulis. Tidak ada kata yang mampu mewakili betapa bersyukur penulis memiliki teman sepertimu, jika tidak ada Vina, mungkin penulis sudah menyerah melewati tantangan dan cobaan yang terjadi. Terima kasih atas tawa canda dan sedih yang telah kita lalui bersama-sama dan tidak henti memberikan supportnya walau hanya melalui call dan chat. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan dalam perkuliahan dan kehidupannya.
13. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Hayo Skripsi, yakni Dinda Intan Dwi Puspita, Bella Aulia Salsabilla, dan Wike Hana Prabawati. Teman-teman yang sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Intan, yang sudah hadir menemani penulis dan selalu mengajak penulis keluar dari zona nyaman sehingga penulis tidak merasa sepi di setiap langkah yang penulis jalani di kota ini. Terima kasih atas kebaikanmu yang begitu berarti bagi penulis. Untuk Wike dan Bella terima kasih atas canda, semangat, serta dukungannya, penulis sangat bahagia memiliki sahabat seperti kalian yang luar biasa, tidak hanya berbagi tawa, tetapi kalian selalu membantu penulis melewati perkuliahan ini. Semoga kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan selalu diberikan kepada kalian.
14. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Dumber but Asam Lambung, yakni Adelia Chaerunnisa Pane, Indy Shafira, dan Arum Monica Putri yang telah menemani penulis selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis, tidak hanya sebagai teman yang

selalu mensupport, tetapi kalian selalu menjadi kebahagiaan penulis. Sahabat yang selalu ada dalam setiap langkah. Terima kasih atas kebersamaan, canda, dan tawa yang menguatkan penulis selama proses ini. Semoga kemudahan dan kelancaran selalu senantiasa diberikan kepada kalian.

15. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada teman-teman Mekdi Delivery, yakni Andisa Syahrani, Anindya Maharani, Afiifa Setiya Lutfiana, Marsha Aulia Putri Fata, serta Alvina Hamdiani sahabat dari sekolah menengah atasku. Terima kasih telah hadir di hidup penulis yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang selalu hadir di perjalanan penulis. Kehadiran kalian memberikan kebahagiaan bagi penulis. Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan oleh Allah SWT dan selalu terjaga persahabatannya di masa depan.
16. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Almh. Salsabila Khairani Rizano sahabatku dari sekolah menengah pertama yang sudah menjadi sahabat penulis selama sisa hidupnya. Kata maaf tidak cukup diucapkan atas apa yang sudah terjadi. Kehilanganmu adalah duka yang mendalam bagi penulis. Tawamu, candamu, kebaikanmu, ceritamu, perjalananmu, pencapaianmu, sedihmu, keluhanmu, marahmu akan selalu penulis kenang semua dalam hati. Aku akan selalu mengenang segala kebaikan dan kebahagiaan yang sudah kita bagi bersama dengan teman-teman kita yang lainnya. Semoga kamu tenang di sisi-Nya Sa. Semoga kita bisa bertemu lagi di surga nanti.
17. Terima kasih untuk diriku sendiri, yang telah bertahan sejauh ini. Perjalanan ini tidak mudah yang penuh liku, keraguan, kekhawatiran, dan luka. Namun, terima kasih karena tak pernah benar-benar berhenti melangkah. Terima kasih telah menghargai setiap upaya, langkah, usaha, dan terus berdiri meski banyak ketakutan. Terima kasih telah terus bekerja keras, bersabar, kuat, dan tetap percaya dengan diri sendiri. Terima kasih karena tak menyerah, walau air mata telah menjadi keseharian pada proses ini. Terima kasih karena selalu kuat mental, jiwa, dan raga serta mampu menguatkan diri sendiri untuk mampu menyelesaikan apa yang sudah dipilih dan dimulai. Semoga semangat ini terus menjadi cahaya bagi penulis dalam setiap langkah ke depannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.3 Evaluasi Kebijakan.....	12
2.4 Pendidikan Politik.....	15
2.5 Partisipasi Politik Perempuan	19
2.6 Kerangka Berpikir.....	22
III. METODELOGI PENELITIAN.....	23
3.1 Tipe Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian.....	23
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
3.7 Teknik Keabsahan Data	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Gambaran Umum DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)	29
4.1.2 Kelompok Sasaran	32
4.2 Hasil Penelitian	33
4.2.1 Evaluasi Pendidikan Politik oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Provinsi Lampung	33

4.3 Pembahasan	56
4.3.1 Evaluasi Pendidikan Politik oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Provinsi Lampung	57
4.3.2 Tantangan Kegiatan Pendidikan Politik Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Provinsi Lampung	69
V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	9
2. Perbandingan Teori Evaluasi Kebijakan	14
3. Perbandingan Model Pendidikan Politik	18
4. Dimensi Fokus Penelitian pada Teori Evaluasi Kebijakan	24
5. Data Informan	26
6. Data Pengurus Organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung	31
7. Tabel Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik KPPI Provinsi Lampung Tahun 2022 – 2023	45
8. Data Peserta Kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik KPPI Provinsi Lampung pada 7 – 8 September 2022	47
9. Data Peserta Kegiatan Pendidikan Politik KPPI Provinsi Lampung pada 10 – 11 November 2022	48
10. Matriks Hasil Penelitian dan Pembahasan	72
11. Tabel Triangulasi	86

DAFTAR GAMBAR

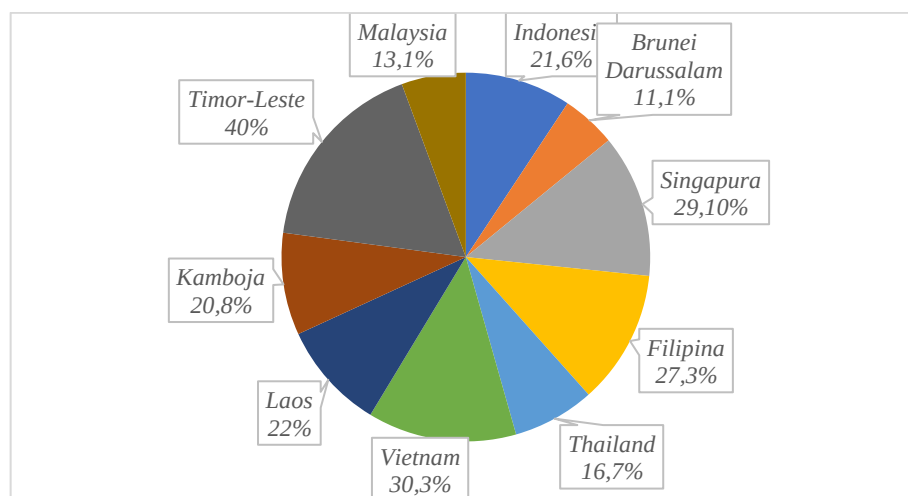
Gambar	Halaman
1. Realitas Keterwakilan Perempuan di Negara ASEAN Tahun 2023	1
2. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Indonesia	2
3. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Lampung	3
4. Kerangka Berpikir Penelitian	22
5. Kegiatan Pendidikan Politik dalam Keterpilihan Perempuan Politisi Lampung di Pemilu Legislatif 2024	36
6. Kolaborasi KPPI Provinsi Lampung, LAdA Damar Provinsi Lampung, dan International Republican Institute (IRI) dalam kegiatan pendidikan politik. .	38
7. Materi Kegiatan Pendidikan Politik KPPI Provinsi Lampung	41
8. Materi Kegiatan Pendidikan Politik KPPI Provinsi Lampung	43
9. Kebijakan Afirmatif Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Pemilu 2024.	52
10. Kegiatan Pelatihan Caleg Perempuan Lintas Partai Politik Se-Provinsi Lampung 2023	53
11. Ibu Helida Haliyanti di Bincang Politik Tribun Lampung	54
12. Lampiran Surat Penelitian	82
13. Lampiran Surat Penelitian	83
14. Wawancara dengan Ibu Budhi Condrowati selaku Bendahara KPPI Provinsi Lampung pada 20 Mei 2025	84
15. Wawancara dengan Ibu Selly Fitriani selaku Koordinator Acara dari Lamban Puan Provinsi Lampung pada 14 Mei 2025	84
16. Wawancara dengan Ibu Aprilliati selaku Anggota Advokasi KPPI Provinsi Lampung pada 26 Mei 2025	85

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi dan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Adanya keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang nantinya dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat mengenai isu-isu relevan bagi perempuan dan anak melalui kebijakan yang mendukung dan memberdayakan, serta berkontribusi langsung dalam menciptakan perubahan yang nyata. Perempuan yang terlibat dalam politik akan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan sosial mengenai pemberian pelayanan terhadap masyarakat, seperti kebutuhan kesehatan masyarakat dibandingkan permasalahan mempertahankan kekuasaan (Suryanef et al., 2022).

Realitas keterwakilan perempuan di Indonesia pada lembaga legislatif saat ini masih menduduki posisi ke-5 di negara-negara ASEAN. Berdasarkan data dari (*Inter-Parliamentary Union & UN Women, 2023*) yang tertera pada Gambar 1.

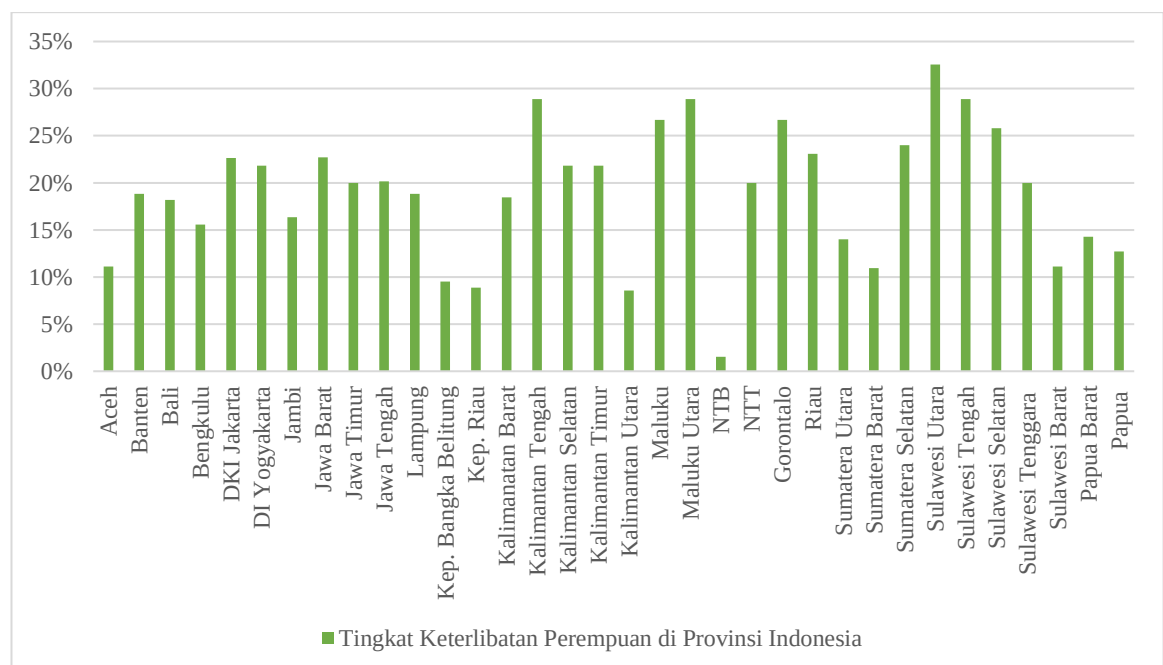


Gambar 1. Realitas Keterwakilan Perempuan di Negara ASEAN Tahun 2023

Sumber: Inter-Parliamentary (2023), data diolah oleh penulis, 2025.

Dari gambar 1, Indonesia memiliki persentase 21.6%, masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Timor-Leste sebesar 40.0%, Vietnam sebesar 30.3%, Singapura sebesar 29.1%, Filipina sebesar 27.3%, dan Laos sebesar 22.0% (*Inter-Parliamentary Union & UN Women, 2023*). Merujuk pada data tersebut, keterwakilan perempuan di Indonesia masih rendah belum mencapai target kuota 30%. Target tersebut telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

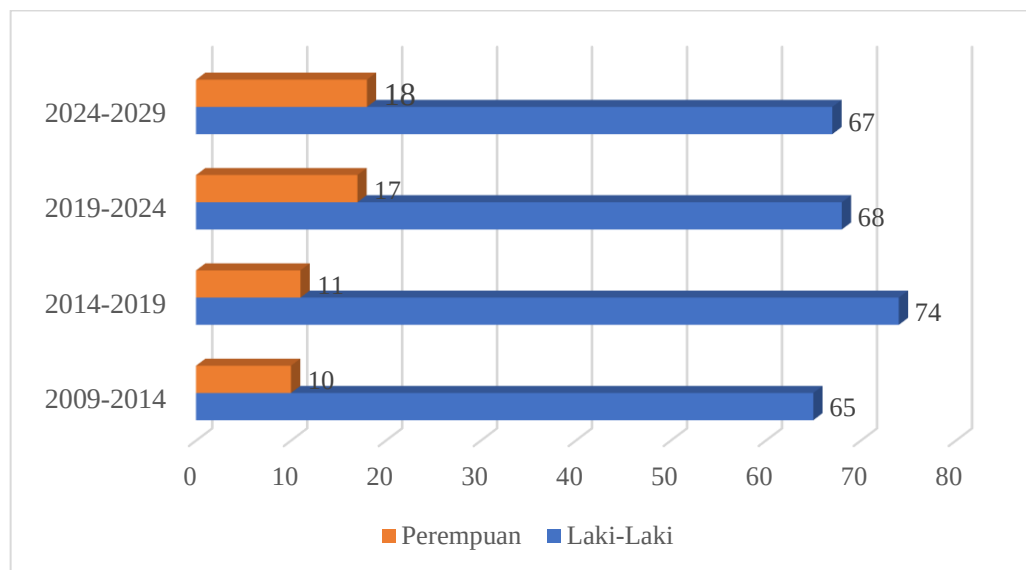
Salah satu provinsi yang memiliki keterwakilan perempuan di parlemen yang rendah ialah di Provinsi Lampung. Tingkat keterwakilan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 Provinsi Lampung pada tahun 2023 memiliki persentase keterlibatan perempuan di parlemen sejumlah 18,82% yang berada di urutan ke-19. Urutan tersebut masih di bawah beberapa provinsi lainnya, seperti Sulawesi Utara di posisi ke-1 dengan jumlah 32,56%, Kalimantan Tengah di posisi ke-2 dengan jumlah 28,89%, Sulawesi Tengah di posisi ke-3 dengan jumlah 28,89%, Maluku Utara di posisi ke-4 dengan jumlah 28,89%, serta Gorontalo dengan jumlah 26,67% di posisi ke-5.



Gambar 2. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), data diolah oleh Penulis, 2025.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tertera dibawah ini.



Gambar 3. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Lampung

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2025.

Dari gambar tersebut menunjukkan jumlah partisipasi keterlibatan perempuan pada parlemen di Provinsi Lampung dalam tiga kali pelaksanaan pemilu terakhir (2009, 2014, dan 2019). Keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi Lampung pada tahun 2009-2014 mencapai 13.33% terdapat 10 kursi yang diraih dari 75 kursi, pada tahun 2014-2019 mencapai 12.94% terdapat 11 kursi yang diraih dari 85 kursi, pada tahun 2019-2024 mengalami peningkatan mencapai 20.00% yang mana terdapat 17 kursi perwakilan perempuan dari 85 kursi, serta pada tahun 2024-2029 mencapai 21,17% terdapat 18 kursi yang diraih oleh perempuan dari 85 kursi. Meskipun keterlibatan perempuan di parlemen meningkat pada tiap periode pemilu, tetapi persentasenya masih jauh dari target kuota 30% yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

Perempuan sudah diberikan hak untuk memilih maupun dipilih setelah diberlakukannya Pasal 28 E ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Namun, kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik masih minim dan belum seimbang dengan jumlah populasi perempuan secara keseluruhan (Haquri & Sahab, 2023). Kebanyakan perempuan menganggap bahwa politik merupakan ranah laki-laki, mereka

berpendapat bahwa dalam aturan agama laki-laki merupakan seorang pemimpin dan jika perempuan terlalu banyak aktivitas di ranah publik maka persoalan domestik menjadi tidak terurus (Destemi & Hartati, 2020).

Politisi perempuan telah banyak bermunculan, tetapi realitasnya pengaruh dari perjuangan aspirasinya belum begitu besar. Kuota 30% bagi perempuan dalam legislatif belum terpenuhi bukan karena rendahnya kapasitas perempuan pada calon legislatif (caleg), tetapi di dalam partai politik terjadi persaingan antara calon legislatif (caleg) laki-laki dan perempuan. Perempuan direkrut memenuhi kuota calon legislatif (caleg) perempuan 30% karena adanya peraturan perundang-undangan. Namun, penempatannya masih berusaha untuk digeser dan kebanyakan perempuan hanya dijadikan sebagai *vote getter* oleh partai politiknya (Haiti., Fatimah., & Marini, 2024). Padahal, regulasi tersebut dibuat dengan tujuan sebagai *affirmative action* untuk memberikan kesempatan bagi kelompok perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, baik pada kepengurusan partai politik maupun keanggotaan di lembaga legislatif.

Stereotip perempuan yang seringkali dipandang kurang mahir dan bahkan tidak pantas untuk terlibat dalam dunia politik, menyulitkan para perempuan mendapat dukungan serta penerimaan dalam diskursus politik. Purwanti & Setiawan (2020) menyatakan terdapat penolakan mengenai partisipasi perempuan dalam politik karena mereka beranggapan bahwa kesetaraan gender bukan sebagai jaminan partisipasi politik bagi perempuan, tetapi dibutuhkan keahlian dan kompetensi untuk bisa berpartisipasi di bidang politik juga dinyatakan Pinilih (2020), bahwa penolakan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik terjadi karena hal tersebut mengalihkan perhatian mengenai isu-isu utama yang lebih penting, seperti perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang paling mendasar dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada bidang politik ialah melalui pendidikan politik. Menurut Alfiah & Tini (2022) bahwa pendidikan politik membantu membuka pandangan dan memotivasi masyarakat terutama bagi para perempuan sehingga mau untuk ikut serta, minimal dalam tatanan politik terendah seperti pemilihan umum daerah. Pendidikan politik akan menumbuhkan kesadaran dan wawasan masyarakat untuk mau berpartisipasi

dalam memengaruhi proses dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Adanya pendidikan politik tidak hanya diperlukan bagi para pemilih yang belum memahami tentang politik, tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang politik. Pendidikan politik menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat memiliki wawasan politik serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender pada bidang politik, maka dibentuklah sebuah organisasi yakni Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung merupakan organisasi independen yang dibentuk dengan visi memelopori gerakan perempuan agar dapat memenuhi hak-hak perempuan dalam bidang politik. Organisasi tersebut bertujuan mengawali demokrasi yang lebih berkualitas, memberikan advokasi mengenai kebijakan publik, menguatkan kapasitas peran dan kompetensi para perempuan, memberikan perlindungan dan kemajuan hak-hak bagi perempuan, khususnya pada bidang politik (Kurniawan, dkk., 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Apriliati selaku Anggota Advokasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung (14/11/2024), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di ketuai oleh, ibu Nenden Tresnanursari selama 10 tahun dari tahun 2016 hingga saat ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung berupa rapat umum menjelang kontestasi pemilihan legislatif, pelatihan-pelatihan perempuan, kegiatan bakti sosial sekaligus dialog interaktif, serta kegiatan lainnya, tetapi kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung lebih aktif saat menjelang pemilihan. Kegiatan pendidikan politik dilakukan setiap tahunnya melalui sosialisasi program untuk memberikan pengetahuan bagi para perempuan di Provinsi Lampung agar mau ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Pendidikan politik juga dilaksanakan dengan tujuan untuk melatih para kader perempuan politik, baik dari lingkup KPPI, Partai Politik, maupun *Non-Government Organization* (NGO), seperti Forum Politisi Perempuan, Perkumpulan Damar, dan lain sebagainya sehingga menjadi bekal bagi mereka untuk mau mewujudkan perubahan agar hak-hak perempuan menjadi lebih di kedepankan dan

terpenuhi sesuai dengan yang seharusnya. Melihat keanggotaan dari KPPI yang juga terdiri dari kader-kader perempuan utusan partai politik, maka pendidikan politik menjadi sebuah upaya untuk memotivasi para perempuan agar mau ikut serta dalam rangkaian kegiatan politik yang lebih aktif, seperti menjadi calon anggota legislatif, pemerintahan, serta pengurus partai politik yang berkualitas sehingga aspirasi perempuan dan anak lebih tersalurkan.

Penelitian terdahulu juga menegaskan mengenai pentingnya pelaksanaan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sepakat bahwa dengan menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan menjadi usaha paling mendasar dan sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan agar ikut berpartisipasi dalam dunia politik (Destemi & Hartati, 2020; Alfiah & Tini, 2022). Kualitas pendidikan juga dianggap menjadi faktor kunci bagi perempuan terhadap representasi mereka di bidang politik sehingga mereka dapat memiliki kebebasan berekspresi mengenai hak-hak mereka (Oteyi., 2023; Khan., 2021). Akan tetapi, penelitian terkait pendidikan politik juga seringkali dilakukan untuk para kader politik. Salah satu penelitiannya dilakukan oleh (Fatkhuri & Nurdin, 2022) yang menjelaskan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam mempersiapkan kader partai politik dalam meningkatkan kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menjadi pembaharuan yakni dengan mengevaluasi dan menganalisis bagaimana penerapan pendidikan politik terutama di Provinsi Lampung. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan dari penerapan pendidikan politik. Oleh karena itu, relevansi antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni mengenai penerapan konsep pendidikan politik yang menjadi fokus dalam peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik.

Adanya penelitian ini, maka penulis bertujuan untuk menunjukkan organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung sebagai lembaga khusus perempuan dalam memaksimalkan peran mereka sebagai wakil dari kaum

perempuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik di Provinsi Lampung. Berdasarkan data wawancara dengan Ibu Apriliati selaku Anggota Advokasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung (14/11/2024), masih terdapat tantangan yang dihadapi setelah melaksanakan pendidikan politik, seperti masih banyaknya perempuan dengan pemikiran yang berbeda sehingga enggan untuk terjun berpolitik, masih terdapat legislator perempuan yang sudah diberikan pelatihan tetapi bingung mengenai apa yang harus dilakukan di parlemen, serta masih adanya kesenjangan mengenai posisi strategis bagi para legislator perempuan dengan laki-laki. Hal ini tentunya sama dengan apa yang menjadi alasan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis juga berfokus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut. Selain itu, penulis mengeksplorasi respon dari masyarakat yang menjadi sasaran KPPI dalam melaksanakan pendidikan politik. Penelitian ini memberikan wawasan dan saran sebagai upaya perbaikan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan politik oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung dalam mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi pada bidang politik di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh KPPI Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pendidikan politik dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi perempuan di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Menganalisis program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada bidang politik.
2. Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pendidikan politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini memperkaya literatur dalam ranah administrasi publik dengan meninjau bagaimana peran evaluasi kebijakan melalui terciptanya kesetaraan gender. Pada penelitian ini juga membuktikan secara empiris mengenai bagaimana pelaksanaan program pendidikan politik dapat memberikan dampak terhadap terciptanya kebijakan publik berbasis gender di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai acuan bagi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan politik sehingga mampu mendorong partisipasi perempuan. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah dan anggota legislatif dalam membuat kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender. Lalu, dengan adanya penelitian ini membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi untuk membantu peneliti dalam memperoleh gambaran pada kerangka berpikir. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan isi antara beberapa studi dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat menjadi dasar kajian sehingga dapat memperluas wawasan berpikir peneliti.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Tahun, & Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alfiyah, N. I. & Tini D. L. R. (2022). Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2021	Penelitian ini menggunakan metode pengabdian pendidikan politik yang dilakukan terhadap Kelompok Wanita di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng melalui sosialisasi dan pelatihan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendidikan politik telah mengalami peningkatan dalam pemahaman mengenai politik bagi kelompok perempuan sebesar 50% dari 40 jumlah anggota.
2.	Destemi, S. & Hartati (2020). Pendidikan Politik Perempuan dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun 2020.	Penelitian ini menggunakan metode pengabdian terhadap organisasi perempuan PKK, Dharmawanita, karang taruna, ibu rumah tangga, dan masyarakat desa dengan dilakukannya sosialisasi dan diskusi tentang pendidikan politik perempuan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Kelurahan Pijon Kecamatan Jambi masih minim akibat adanya manipulasi budaya dan agama, keterbatasan akses, kurangnya pemaksimalan potensi diri, dan lain sebagainya.
3.	Fatkhuri & Nurdin (2022). Pelatihan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta	Penelitian ini menggunakan metode dalam penyelesaian masalah melalui pendidikan, pelatihan, dan simulasi. Terdapat dua pendekatan, yakni pendekatan teori (memberikan pengetahuan dengan konsep dan teori kapasitas kepemimpinan perempuan) dan pendekatan praktik (memberikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan telah memperoleh pemahaman dan keterampilan yang baik dalam penyusunan strategi pemenangan pemilihan umum legislatif untuk periode selanjutnya

- | | | | |
|----|---|--|--|
| | | keterampilan dasar dalam konteks penyusunan strategi dalam kontestasi pemilu). | |
| 4. | Oteyi., Vadukweenem, J., et al. (2023).
<i>Impact of Education on Women in Politics for National Development: African Experience</i> | Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang menelaah literatur, data sekunder, laporan dari UNESCO, dan lain sebagainya. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif para perempuan dalam politik tidak mempengaruhi perannya sebagai seorang istri, ibu, maupun ibu rumah tangga. |
| 5. | Khan, N., M. Jawad., et al. (2021).
<i>Assessing the Impact of Education on Women's Political Participation in Khyber Pakhtunkhwa Pakistan</i> | Penelitian ini melakukan pengambilan sampel secara acak memilih perempuan dari dewan serikat pada 4 desa di Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat dengan partisipasi politik mempunyai hubungan yang kuat. Tingkat pendidikan perempuan juga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam politik. |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025.

Merujuk dari pemaparan penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan fokus dan cakupan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Destemi & Hartati, 2020; Fatkhuri & Nurdin, 2022; Alfiah & Tini, 2022), proses pelaksanaan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada bidang politik lebih menekankan upaya instansi pemerintahan serta para akademisi. Fokus mereka hanya terbatas pada kewajiban instansi pemerintah, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Kelurahan Pijoan, dan Kecamatan Jambi Luar Kota tanpa melibatkan sektor lain yang sesuai dalam memberdayakan perempuan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Oteyi., 2023; Khan., 2021) juga hanya berfokus terhadap dampak pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Distrik Dir Hulu dan Nigeria bagi perempuan dalam memahami bidang politik tanpa melibatkan kesatuan pendidikan politik sebagai suatu konsep yang akan membantu meningkatkan partisipasi perempuan.

Penelitian ini membawa sebuah kebaruan dengan cakupan ruang pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung. Penelitian ini mengintegrasikan berbagai elemen penting dalam memberdayakan perempuan di bidang politik, seperti keterlibatan kader perempuan partai politik, calon legislatif, advokat perempuan, berbagai *Non-Government Organization* (NGO), dan masyarakat luas. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan

politik pada penelitian ini memandang secara menyeluruh, dengan melibatkan aktor-aktor yang menjadi kunci dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di dunia politik. Penelitian ini tidak hanya menambah dimensi baru, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan partisipasi perempuan politik di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik, meliputi rendahnya tingkat pendidikan pada kelompok perempuan, stereotip perempuan yang dianggap tidak pantas, dan penempatan yang tidak sesuai dari partai politik kepada para legislator perempuan. Analisis ini bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan politik sehingga nantinya akan menjadi bahan acuan penulis untuk mengevaluasi hambatan-hambatan yang ada dengan menyusun strategi yang efektif terhadap Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung. Penulis mengevaluasi menggunakan teori evaluasi William Dunn yang membantu menilai bagaimana program kegiatan tersebut diterapkan dan melihat apakah tujuan yang ditujukan oleh organisasi telah tercapai atau tidak. Teori ini mencakup beberapa dimensi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dengan adanya program tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

Pada kehidupan modern saat ini, kita tidak bisa lepas dari apa yang di kenal dengan istilah kebijakan publik. Kebijakan publik dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi negara berasal dari kewenangan direksi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Menurut Tachjan, pada hakikatnya kebijakan ialah kesepakatan dari suatu keputusan beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan merupakan sebuah kegiatan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat serta publik. Kebijakan dibuat pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang optimal sehingga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat (Dewi, 2022).

Menurut Nugroho, terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yakni 1) kebijakan publik menggambarkan sesuatu yang mudah untuk dipahami karena memiliki makna sebagai hal-hal yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional, dan 2) kebijakan publik menjadi sesuatu yang mudah diukur karena tolak ukurnya jelas, yakni sejauh mana kemajuan perwujudannya sudah dilewati. Kebijakan publik memiliki implikasi yang khas dalam praktik pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan publik bukanlah sekedar respons spontan, tetapi sebuah rangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik memiliki rangkaian tindakan yang saling terkait dan membentuk pola tertentu guna mencapai sasaran kebijakan secara sistematis. Adanya kebijakan publik menjadi cerminan pemerintahan dalam bertindak secara nyata terhadap masalah yang ada di masyarakat (Meutia, 2017).

Proses pelaksanaan suatu kebijakan memberikan dampak dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Adanya proses tersebut menjadi sebuah kegiatan yang membantu mewujudkan kebijakan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam menciptakan suatu kebijakan, memerlukan waktu yang tidak dapat ditentukan serta berbagai bentuk dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat (Desrinelti, *et al.*, 2021). Menurut Dewi (2022) tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kebijakan, yakni diantaranya:

1. Identifikasi Masalah
2. Formulasi Kebijakan
3. Implementasi Program/Kebijakan
4. Evaluasi Kebijakan

2.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk melihat sebab terjadinya kegagalan maupun hasil dari jalannya suatu kebijakan publik ataupun program. Ralph Tyler dalam (Akbar & Mohi, 2018), evaluasi merupakan sebuah proses dalam menentukan sejauh mana sasaran pendidikan dapat terlaksana. Model evaluasi dalam pandangannya mengarah kepada efektivitas tujuan yang ingin dicapai. Pandangan Tyler menjadi titik awal dalam evaluasi program yang modern. Tyler menghasilkan gagasan yang luas bahwa pada tiap suatu sistem pembelajaran

yang akan di evaluasi harus di dasarkan pada perkiraan yang akan terjadi. Terdapat langkah-langkah pelaksanaan evaluasi menurut Tyler, yakni: 1) menentukan tujuan, 2) merumuskan dimensi, 3) mengembangkan instrumen, 4) memastikan program telah selesai, 5) menganalisis data, 6) membuat kesimpulan, dan 7) mengambil kesimpulan.

Sementara itu, Edward A. Suchman (1967) memberikan pemahaman lebih luas bahwa pelaksanaan evaluasi sama seperti dengan sebuah penelitian, yakni harus didasarkan pada logika metode ilmiah. Suchman mengharapkan setiap evaluator dapat melakukan evaluasi dengan teknik penelitian yang sesuai dengan kenyataan serta kebutuhan pada evaluasi tertentu. Suchman berpandangan bahwa evaluasi bukanlah *“process of making judgment of worth”* tetapi *“those procedures for collecting and analyzing data which increase the possibility for proving rather than asserting the worth of some social activity”*. Hal ini dapat diketahui bahwa Suchman beranggapan evaluasi sebagai sebuah prosedur mengumpulkan lalu menganalisis data yang terjadi di lapangan untuk membuktikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi daripada hanya memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan publik maupun program. Suchman melihat evaluasi sebagai proses sosial keberlanjutan, yang pada dasarnya melibatkan asumsi terhadap kegiatan yang akan di evaluasi terhadap nilai-nilai pribadi partisipan begitu juga dengan evaluator. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam evaluasi kebijakan Suchman (1967), yakni: 1) mengidentifikasi tujuan program, 2) menganalisis permasalahan, 3) mendeskripsi dan standarisasi kegiatan, 4) mengukur setiap perubahan, 5) menentukan penyebab terjadinya perubahan, dan 6) mengindikasi durasi dampak yang muncul.

Kedua pandangan antara Tyler (1950) dan Suchman (1967) memberikan pendekatan yang berbeda dalam teori evaluasi kebijakan. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan efektivitas program kebijakan. Akan tetapi, Tyler lebih menekankan mengenai pentingnya kejelasan suatu tujuan serta langkah-langkah sistematis dalam mengevaluasi. Suchman lebih melihat proses yang lebih dinamis dan berbasis terhadap penelitian sehingga dalam mengevaluasi ditekankan mengenai pentingnya pemahaman secara kontekstual dan keterlibatan sosial tersebut.

Dalam pandangan William Dunn dalam Tresiana, N. & Duadji, N. (2019), ia memberikan pemahaman mengenai evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian tingkat (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi yang ditekankan oleh Dunn bermaksud untuk dapat mengungkapkan sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, serta peluang yang ingin dicapai oleh masyarakat melalui tindakan publik, bukan hanya sekedar proses untuk mengukur hasil akhir. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam evaluasi kebijakan Dunn (2003), yakni: 1) efektivitas, 2) efisiensi, 3) kecukupan, 4) pemerataan, 5) responsivitas, dan 6) ketepatan.

Dunn menekankan bahwa evaluasi memerlukan informasi yang valid dalam memberikan pemahaman terhadap fungsi adanya suatu kebijakan publik maupun program dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Adanya skala nilai yang tepat, maka memungkinkan para pemangku kebijakan menggarap mengenai apa yang perlu diperbaiki dan memberikan panduan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Dunn juga mengidentifikasi alur yang perlu untuk dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi, yakni mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, serta menyesuaikan dan merumuskan masalah kembali.

Dari berbagai pandangan mengenai teori evaluasi kebijakan antara Tyler, Suchman, dan Dunn terdapat perbandingan diantara ketiganya dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Teori Evaluasi Kebijakan

Teori	Kelebihan	Kekurangan	Relevansi
Tyler	Teori ini berfokus pada efektivitas tujuan yang telah ditentukan dan memiliki langkah-langkah yang mudah untuk dilakukan	Kurang adaptif terhadap perubahan yang terjadi dan mengabaikan konteks sosial maupun politik secara luas	Relevan dalam penelitian ini Teori Tyler dapat menilai sejauh mana program pendidikan politik KPPI mencapai tujuannya secara spesifik, tetapi tidak mempertimbangkan faktor sosial-politik perempuan yang ada di Provinsi Lampung
Suchman	Teori ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan memperhatikan	Prosesnya lebih kompleks dan memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Teori	Relevan dalam penelitian ini dapat mengevaluasi program KPPI dengan mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi

	konteks sosial lebih luas	ini juga tidak cocok untuk program dengan tujuan jangka pendek	pengaruh partisipasi perempuan Provinsi Lampung dalam bidang politik
Dunn	Teori ini menyediakan wawasan yang lebih komprehensif dimana menekankan pada pengumpulan informasi yang valid dan dapat membantu pengambilan keputusan kebijakan yang lebih baik	Keperluan data yang lengkap dan kompleks, serta lebih berfokus kepada analisis kebijakan daripada proses implementasi	Relevan dalam mengetahui sejauh mana program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPPI sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai perempuan dalam konteks sosial dan politik di Provinsi Lampung. Teori ini berguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk memperbaiki kebijakan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025.

Teori evaluasi kebijakan Dunn merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Alasan peneliti memilih teori ini karena dapat melihat keseluruhan penerapan program pendidikan politik yang dijalankan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Dunn memiliki enam tahapan pelaksanaan evaluasi yang membantu proses penelitian ini, seperti efektivitas yang melihat hasil dari tujuan program pendidikan politik benar-benar tercapai, efisiensi yang melihat penggunaan sumber daya baik waktu, biaya, dan tenaga dalam program pendidikan politik telah digunakan secara optimal, kecukupan yang melihat penyampaian materi pendidikan politik telah memenuhi kebutuhan partisipan, pemerataan yang melihat jangkauan KPPI terhadap semua kelompok perempuan, responsivitas yang melihat penyesuaian KPPI terhadap tantangan dan kebutuhan program pendidikan politik kedepannya, serta ketepatan yang melihat program tersebut telah tepat sasaran dalam mendorong partisipasi perempuan. Teori evaluasi Dunn juga membantu penelitian ini untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap keberhasilan program pendidikan politik di masa mendatang.

2.4 Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengubah sikap maupun perilaku suatu individu ataupun kelompok orang yang mana terdapat sebuah pemberian edukasi maupun pelatihan yang akan dilakukan. Menurut M. Nur Khoiron (1999), pendidikan politik disebut dengan istilah *political forming* atau

politische bildung. Kedua konsep tersebut menjelaskan tujuan dan karakteristik pendidikan politik. *Forming* pada setiap individu dapat muncul selama proses pembentukan, yang mencakup pemahaman posisi dan status politiknya di masyarakat. Pendidikan politik tidak hanya membahas konsep mengenai sistem pemerintahan dan teori politik, tetapi juga memberi perhatian pada bagaimana setiap orang memahami peran mereka dalam kehidupan politik sebagai warga negara, pemilih, dan aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Individu akan lebih aktif berpartisipasi dalam politik dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Sedangkan, *Bildung* akan menempatkan bagaimana pendidikan menjadi sebuah proses pembentukan diri yang lebih dalam. Konsep ini menjelaskan pendidikan politik sebagai perjalanan yang melibatkan pemikiran tentang diri sendiri, pembangunan karakter, serta membentuk prinsip moral dalam berpolitik. Pendidikan politik pada konsep ini akan mengajarkan bahwa pembuatan keputusan politik akan memiliki konsekuensi, baik sosial, moral, dan etis yang mana menjadi tanggung jawab pembuat keputusan. Proses *Forming* dan *Bildung* dapat menghasilkan suatu pendidikan politik yang komprehensif. Hal ini tentunya dapat terjadi, karena pendidikan politik dilaksanakan tidak hanya menjelaskan kepada masyarakat mengenai dunia politik saja, tetapi juga memberikan mereka alat agar dapat mengembangkan kesadaran kritis dan bertindak secara moral dalam konteks politik.

Pendidikan politik tentunya penting untuk membangun skeptisisme politik yang kuat dan kebijaksanaan dalam menangani isu-isu politik yang berkembang. Pendidikan politik mendorong orang untuk memahami teori politik, dinamika kekuasaan, dan struktur politik saat ini dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentangnya. Ini juga mendorong mereka untuk tidak hanya mengambil informasi politik secara langsung, tetapi juga untuk mengkritisi dan menganalisisnya secara kritis. Pendidikan politik membuka wawasan untuk melihat isu-isu politik dari berbagai sudut pandang, memungkinkan masyarakat untuk memahami peristiwa politik dengan cara yang lebih kritis, sehingga masyarakat

dapat menyaring informasi dan membuat kesimpulan berdasarkan data dan logika, bukan hanya opini atau desakan dari pihak tertentu.

Dengan demikian, mereka yang menerima pendidikan politik akan memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami peristiwa politik dengan cara yang lebih ilmiah dan rasional. Selain itu, upaya ini juga dapat memastikan bahwa masyarakat bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat, baik dalam hal tanggung jawab sosial maupun politik itu sendiri. Pendidikan politik dalam jangka panjang akan menghasilkan masyarakat yang tidak hanya aktif dalam politik, tetapi juga cerdas dalam membuat keputusan politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Model pendidikan politik pada pandangan Naning (1982) dibagi menjadi model formal dan informal. Menurut Naning, model pendidikan formal merujuk mengenai proses penyebaran informasi, prinsip, standar, serta praktik politik yang sistematis melalui lembaga pendidikan yang resmi, seperti pada lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Pada model tersebut, penyampaian pendidikan politik layaknya pendidikan pada umumnya yang sudah biasa dilaksanakan oleh akademisi berpengalaman di bidang politik. Oleh karena itu, pendidikan politik akan mengajarkan mengenai mekanisme politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dan prinsip-prinsip demokrasi yang memang telah berlaku di masyarakat.

Sementara itu, model pendidikan informal biasanya diterapkan pada luar institusi pendidikan formal. Model ini menurut pandangannya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu akan dengan mudah memahami mengenai politik melalui interaksi-interaksi sosial dari berbagai lingkungan sekitar, seperti di lingkungan rumah, organisasi sosial, dan bahkan yang lebih mudah lagi untuk di akses melalui media komunikasi massa, seperti radio, televisi, majalah, dan surat kabar. Model tersebut tentunya tidak terorganisir, tetapi dapat menghasilkan wawasan yang lebih luas bagi masyarakat karena memandang politik dari berbagai pandangan yang tidak kaku dan dapat terlibat secara praktis.

Namun, pada pendidikan politik saat ini, model yang seringkali diterapkan ialah model non-formal. Model non-formal dianggap memiliki keunggulan sehingga mudah dalam menjangkau masyarakat secara langsung dan fleksibel, dengan tidak terikat oleh struktur dan kurikulum formal yang terlihat kaku. Model tersebut dapat memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan maupun keterampilan berpolitik melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di luar institusi pendidikan formal, seperti mengikuti pelatihan, seminar, *workshop*, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami isu-isu politik dalam konteks yang lebih relevan dengan kehidupan mereka.

Tabel 3. Perbandingan Model Pendidikan Politik

Model Pendidikan Politik	Kelebihan	Kekurangan
Formal	Model ini memiliki struktur yang jelas yang mana biasanya diajarkan oleh tenaga pendidik yang berkompeten dan berpengalaman pada bidang politik	Hanya dapat diakses oleh individu yang terdaftar pada lembaga pendidikan tersebut. Model ini kurang fleksibel dan terkesan kaku, sehingga tidak relevan dengan situasi politik yang berkembang di masyarakat.
Informal	Model ini mudah untuk diakses melalui interaksi sosial dengan sekitar. Pendidikan politik akan lebih luas dan beragam karena melibatkan berbagai perspektif	Tidak terorganisir dengan baik sehingga cenderung bervariasi. Model ini juga dapat menimbulkan kesalah pahaman dan penggiringan opini pribadi.
Non-Formal	Model ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai bentuk penyampaian dan relevan dengan isu-isu politik yang sedang dibicarakan.	Kualitas pendidikan politik tergantung dengan penyelenggara maupun fasilitator dari kegiatan tersebut dan tidak selalu terorganisir dengan baik.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025.

Model pendidikan politik pada penelitian ini menggunakan Model Non-Formal. KPPI menyelenggarakan pendidikan politik melalui sosialisasi, seminar, serta pelatihan bagi perempuan-perempuan di Provinsi Lampung yang menyesuaikan kebutuhan peserta secara fleksibel. Model Non-Formal pendidikan politik juga lebih mudah di terima dan di terapkan kepada masyarakat membantu mereka lebih memahami proses jalannya politik. Pendidikan politik non-formal lebih efektif

dalam menangani isu-isu permasalahan kurangnya partisipasi perempuan, karena dapat dilakukan diskusi terbuka antar pemateri dengan peserta untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas.

2.5 Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik merupakan sebuah konsep mengenai bagaimana masyarakat ataupun rakyat banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Suatu negara memerlukan partisipasi politik dari masyarakat, jika tidak maka negara tersebut cenderung sentralistik dan otoriter. Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting bagi negara demokrasi, yang mana warga negara ikut serta dalam mewujudkan berbagai kebutuhan dan kepentingannya. Menurut Michael Rush & Philip Althoff menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan umum serta ikut serta untuk menentukan pemimpin dalam suatu pemerintahan (Arniti, 2020).

Pandangan mereka menekankan bahwa partisipasi politik tidak hanya sebatas bagaimana kita menggunakan hak pilih dalam pemilu, tetapi mencakup banyak hal yang lebih luas, seperti dengan mengikuti organisasi maupun partai politik, melakukan debat politik, berpartisipasi dalam aksi sosial dengan permasalahan yang sedang terjadi ataupun menyampaikan pendapat melalui media massa. Dengan adanya keterlibatan aktif tersebut, memungkinkan warga negara untuk dapat menyuarakan kepentingan mereka. Partisipasi politik dapat memungkinkan berbagai pendapat dan suara akan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih adil dan merata. Hal ini perlu untuk dilakukan, karena partisipasi sendiri menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara, terlebih lagi dalam menjaga kelangsungan dan kualitas pemerintah yang demokratis.

Myron Wiener menyatakan partisipasi politik memiliki sifat yang sukarela. Partisipasi politik menurutnya tidak memiliki unsur pemaksaan sehingga baik individu ataupun kelompok dapat berpartisipasi dalam politik atas dasar kemauannya sendiri (Warjiyati, 2016). Hal ini tentunya juga berlaku pada partisipasi perempuan dalam politik. Partisipasi tidak hanya sekedar sebuah

keterlibatan perempuan dalam proses politik, tetapi juga bagaimana upaya dalam menggali potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh perempuan dalam konteks politik. Pandangannya memberikan pemahaman bahwa dengan adanya keterlibatan perempuan dalam politik, dapat membantu mereka untuk memperjuangkan aspirasi mengenai hak-hak mereka dengan struktur yang biasanya dikuasai oleh laki-laki. Jika partisipasi perempuan mengalami peningkatan, maka dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dimana semakin membuka ruang bagi para perempuan dalam menentukan arah kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.

Pandangan Michael Rush & Philip Althoft dan Myron Wiener saling menekankan bagaimana pentingnya partisipasi politik. Michael Rush & Philip Althoft menyoroti cakupan partisipasi politik yang bukan hanya sekedar penggunaan hak pilih. Sementara itu, Myron Wiener menyoroti bahwa dalam partisipasi politik memiliki sifat yang sukarela. Kedua pandangan tersebut memiliki kesamaan bahwa dengan berpartisipasi dalam politik dapat membentuk kebijakan publik yang adil dan merata. Adanya partisipasi politik yang aktif dan bebas dari pemaksaan manapun menjadi sebuah kunci dalam sistem demokrasi yang sehat, karena warga negaranya dapat menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka, sehingga dapat menghasilkan keputusan politik yang demokratis.

Keterlibatan perempuan politik sendiri juga akan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap beragam kebutuhan dan pengalaman yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Kehadiran perempuan dalam proses politik memungkinkan masalah yang sering terabaikan, seperti hak-hak anak, kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesetaraan gender, menjadi lebih penting. Kebijakan yang didominasi oleh laki-laki tidak selalu memprioritaskan banyak masalah yang berdampak besar pada kehidupan perempuan dan anak-anak, yang lebih sering berada dalam bahaya. Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan politik, negara dapat memanfaatkan sudut pandang yang lebih beragam, tidak hanya berasal dari pengalaman dan sudut pandang laki-laki tetapi juga dari pandangan yang lebih menyeluruh dari perempuan. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga dapat meningkatkan

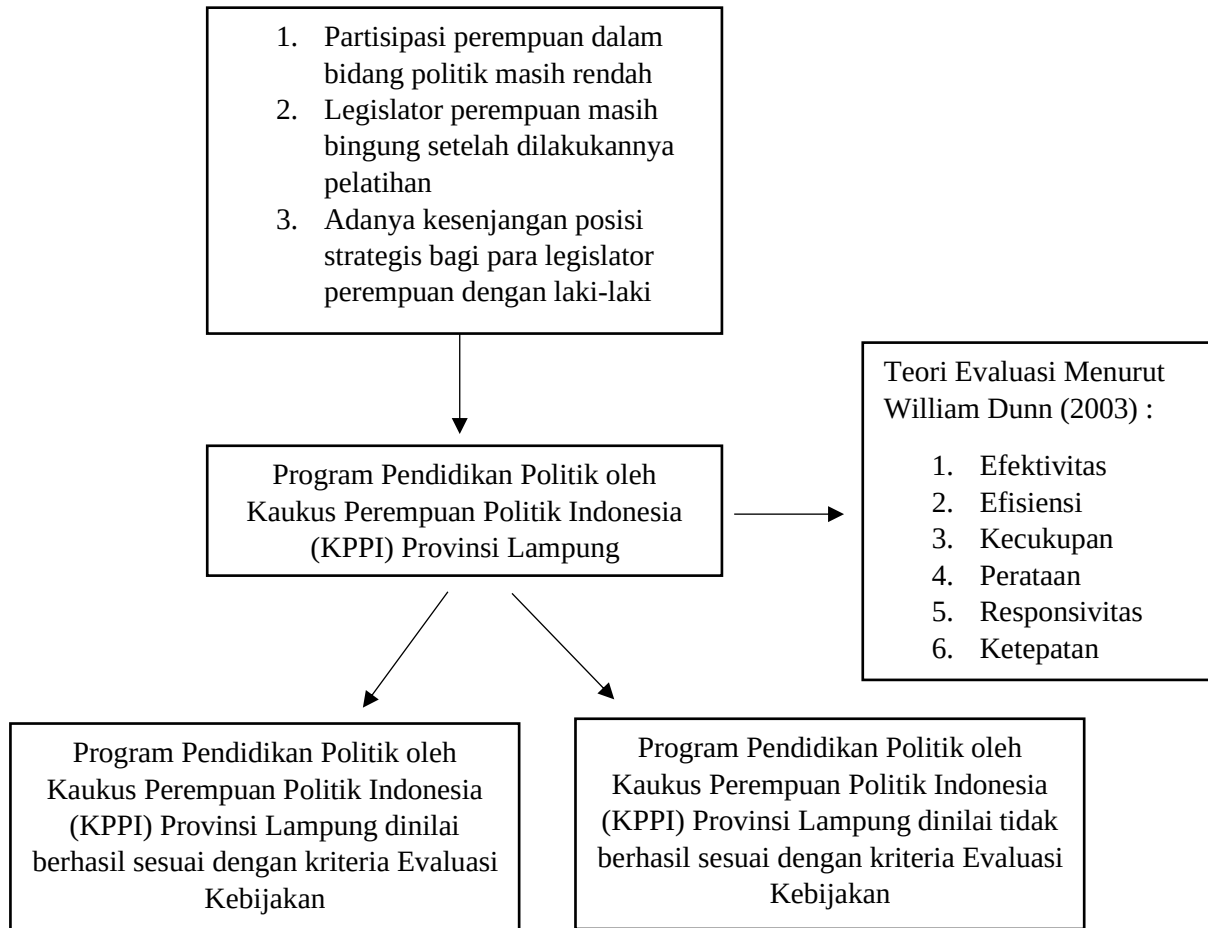
efektivitas tata kelola pemerintahan karena kebijakan yang dibuat lebih mencerminkan kebutuhan nyata dari seluruh lapisan masyarakat, yang menghasilkan pemerintahan yang lebih adil, terbuka, dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Terdapat argumen penting menurut Squires (2000) mengenai perluasan partisipasi perempuan pada bidang politik. Pertama, kehadiran perempuan dalam lembaga pengambil keputusan dapat memberikan representasi dan kepercayaan kepada masyarakat, khususnya perempuan, bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting untuk menghilangkan gagasan bahwa politik hanyalah urusan pria dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif. Kedua, masalah keadilan seharusnya ada kesetaraan kuantitatif antara perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif agar kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan seluruh warga negara, bukan hanya satu kelompok. Ketiga, keterlibatan perempuan dalam politik juga bertujuan untuk membantu kepentingan perempuan itu sendiri, yang seringkali terpinggirkan dalam kebijakan yang tidak mempertimbangkan gender. Keempat, revitalisasi demokrasi menekankan bahwa perempuan harus berpartisipasi secara aktif dalam posisi kekuasaan untuk mengubah pandangan politik saat ini dan membuat kebijakan yang lebih inklusif dan representatif.

Secara keseluruhan, pandangan tersebut memberikan kerangka yang kuat untuk mendorong keterlibatan perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan perempuan, tetapi juga mewujudkan kebijakan yang berkeadilan dan merata mengenai beragam kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi ini akan mengubah cara pandang politik yang sudah selama ini tertanam.

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan paparan mengenai permasalahan serta landasan teori yang telah dijabarkan di atas, maka diringkaskan dalam bentuk gambar kerangka pikir, sebagai berikut.



Gambar 4. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana akan menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan pendidikan politik. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan maupun keberhasilan setelah diselenggarakannya program kegiatan pendidikan politik, baik pada organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) itu sendiri maupun pihak eksternal yang ikut serta dalam program tersebut. Menurut Abdussamad (2021), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami makna yang terkandung dalam konteks sosial, budaya, dan individu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan dengan jelas mengenai proses pelaksanaan pendidikan politik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, lalu memberikan saran rekomendasi mengenai program tersebut kedepannya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan jalannya suatu penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai evaluasi pendidikan politik oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengukur maupun menilai dampak yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan pendidikan politik sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung.

Lalu, peneliti mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi William Dunn (2003), yang mana memiliki enam dimensi, yakni :

Tabel 4. Dimensi Fokus Penelitian pada Teori Evaluasi Kebijakan

Fokus	Aspek Penelitian
Efektivitas	Menganalisis tingkat keberhasilan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPPI terhadap peningkatan jumlah perempuan yang menjadi anggota partai politik di Provinsi Lampung.
Efisiensi	Menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan, baik waktu, biaya, dan tenaga dalam pelaksanaan program tersebut meningkatkan partisipasi perempuan.
Kecukupan	Menilai apakah materi dan metode pendidikan politik yang diberikan oleh KPPI sudah memenuhi kebutuhan peserta dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik
Perataan	Menilai apakah pendidikan politik yang dilaksanakan tersebut telah memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan di Provinsi Lampung untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
Responsivitas	Menilai sejauh mana program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPPI mampu menanggapi kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Provinsi Lampung.
Ketepatan	Menilai sejauh mana pendidikan politik yang diselenggarakan tepat sasaran, baik dari segi waktu, tempat, peserta, maupun metode dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.

Sumber: Adaptasi Teori William Dunn dengan Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh KPPI Provinsi Lampung, 2025.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, yang mana memiliki fokus utama pada program pendidikan politik yang dijalankan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Provinsi Lampung. Pemilihan lembaga tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Kaukus Perempuan Politik Indonesia merupakan lembaga yang terdiri dari para kader-kader perempuan politik sehingga dapat dengan mudah melaksanakan program kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, NGO, dan lain sebagainya yang terlibat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan sebuah acuan dalam penelitian yang ditemukan berdasarkan fakta empiris setelah dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berdasarkan data primer dan data sumber, yakni:

1. **Data primer**, yakni sebuah data penelitian yang sumbernya diperoleh secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan hasil observasi. Perolehan data dilakukan melalui perekaman wawancara langsung berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber, baik dari pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), pemangku kepentingan, masyarakat, serta ahli dalam bidang administrasi publik. Instrumen yang digunakan dalam melakukan wawancara berupa perekam suara dan catatan kecil.
2. **Data sekunder**, yakni sebuah data penelitian yang sumbernya diperoleh dari sumber pendukung, seperti penelitian sebelumnya maupun beragam data dengan sumber tertulis yang nantinya digunakan sebagai informan pendukung dalam menganalisis data primer. Data tersebut berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, peraturan daerah, artikel, jurnal, serta data lainnya yang relevan dan menunjang penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah paling utama yang dilakukan dalam penelitian karena tanpa adanya pengumpulan data, penelitian tidak dapat dilakukan apabila tidak mendapatkan data yang memenuhi standar penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, ialah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode yang paling efektif dalam memperoleh informasi secara mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data sebagai upaya

mengidentifikasi informasi mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung. Wawancara membantu peneliti mengerti dan memahami terkait pelaksanaan pendidikan politik, serta mengetahui tantangan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, kader perempuan politik, NGO, maupun Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) itu sendiri. Adanya teknik ini, membantu peneliti dapat memahami kondisi secara langsung dengan lebih komprehensif dan faktor-faktor yang menjadi penunjang keberhasilan maupun kegagalan penerapan pendidikan politik oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung.

Tabel 5. Data Informan

No.	Nama Informan	Informan	Data yang diperoleh
1.	Budhi Condrowati, S.E.	Bendahara DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung	Mengetahui bagaimana bentuk penerapan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPPI Provinsi Lampung
2.	Aprilliati, S. H., M.H.	Anggota Advokasi DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung	Mengetahui bagaimana peran KPPI dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Provinsi Lampung
3.	Selly Fitriani	Lembaga Lamban Puan Provinsi Lampung	Mengetahui bagaimana jalannya kegiatan pendidikan politik dan kendala yang terjadi selaku koordinator acara dan kolaborator pelaksanaan program.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah metode pengumpulan data yang efektif dalam menggali informasi terkait permasalahan ataupun kebijakan yang terjadi, baik dalam bentuk tulisan maupun visual sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah adanya wawancara dan observasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan terkait pendidikan politik, keterwakilan perempuan, laporan yang relevan, serta dokumentasi lainnya yang berkaitan. Adanya teknik ini, peneliti dapat memperkuat penemuan data yang sudah diperoleh dan memastikan ketepatan

informasi pada penelitian. Dokumentasi yang mengatur tentang pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 4 mengenai Pendidikan Politik

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan konsep analisis data menurut Miles dan Huberman (2014), yang mana terdiri dari:

1. Kondensasi data, merupakan tahap dimana data yang diperoleh peneliti nantinya dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga perlu dilakukannya proses merangkum, memilih, penyederhanaan dan pemusatan data dari hasil wawancara di lapangan. Proses ini dilakukan setelah peneliti memperoleh data melalui wawancara dan pengumpulan informasi yang ada di lapangan, kemudian hasil wawancara tersebut dipilah-pilah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti, seperti pengumpulan data mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung setelah mewawancarai informan.
2. Penyajian data, dalam tahap ini peneliti akan mengubah hasil ke dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan untuk memahami permasalahan yang diteliti. Tahap ini memungkinkan peneliti untuk memberikan deskripsi yang komprehensif dan mendalam pada hasil temuan dari wawancara dan dokumen yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik oleh KPPI Provinsi Lampung.
3. *Conclusion*, yang mana data yang diperoleh peneliti ditarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal lalu dibuktikan dengan teori evaluasi William Dunn.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah validitas mengenai derajat ketepatan antara data yang terjadi dengan objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan pada peneliti (Sugiyono, 2019). Teknik keabsahan data terdiri dari:

1. Uji kredibilitas (*credibility*), yang mana dilakukannya penyelidikan agar tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Data penelitian dapat dikatakan kredibel jika terdapat persamaan dari apa yang telah dilaporkan peneliti dengan kenyataan pada objek yang diteliti. Pada uji kredibilitas, terdapat beberapa tahapan, seperti perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan *member check*.
2. Uji transferabilitas (*transferability*), pada tahap ini penelitian dapat dikatakan transferabilitas tergantung pada sejauh mana penelitian tersebut diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Pembaca perlu untuk memperoleh gambaran serta pemahaman mengenai laporan penelitian.
3. Uji dependabilitas (*dependability*), proses ini melakukan aktivitas audit terhadap proses penelitian yang berlangsung. Data penelitian tidak bisa dikatakan *dependable* jika peneliti tersebut tidak membuktikan telah melaksanakan proses penelitian secara nyata.
4. Uji konfirmabilitas (*confirmability*), tahapan ini melakukan transparansi dalam penelitian, sehingga peneliti akan menyatakan kepada khalayak banyak mengenai proses penelitiannya, lalu memberikan pihak lain kesempatan dalam menilai hasil temuannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung ditinjau melalui teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn (2003), yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari keseluruhan dimensi tersebut, dimensi ketepatan menunjukkan hasil yang paling kuat, karena pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan kebijakan dan mampu memberikan bukti nyata akan keberanian menyuarakan isu krusial yang penting untuk ditindak lanjuti. Program tersebut tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kesadaran politik perempuan. Namun, pada dimensi efektivitas dan kecukupan menunjukkan hasil yang lemah bahwa program pendidikan politik tersebut hanya berlangsung hingga tahun 2023 sehingga belum ada dampak berkelanjutan yang mampu menguatkan kapasitas perempuan di bidang politik.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan analisis pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung disarankan untuk memperluas sasaran peserta kegiatan pendidikan politik, tidak hanya dari kalangan lintas partai politik, tetapi juga dari kelompok rentan seperti perempuan disabilitas, pemuda, dan masyarakat lokal. Langkah ini penting karena kelompok-kelompok tersebut seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan politik, sehingga dapat mewujudkan pemerataan dan inklusivitas.

2. KPPI Provinsi Lampung diharapkan dapat mengembangkan platform digital yang lebih interaktif dan berkelanjutan agar proses pendidikan politik tidak hanya bersifat sementara atau berbasis *event* saja, melainkan materi pendidikan politik dapat diakses secara berkala dan mandiri oleh peserta maupun masyarakat sebagai media memperbarui informasi terkini terkait kebijakan, isu-isu krusial, dan peluang keterwakilan perempuan dalam bidang politik
3. KPPI Provinsi Lampung perlu merancang strategi pelaksanaan pendidikan politik yang tidak hanya terpusat pada periode pra-pemilu, tetapi berlangsung secara berkelanjutan di setiap tahun. Pembinaan yang konsisten akan memastikan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi politik, sehingga kesiapan mereka untuk terlibat dalam politik tidak hanya muncul pada saat menjelang pemilu, melainkan juga menjadi bagian dari proses panjang membangun kader politik perempuan yang berkualitas.
4. Mengingat tantangan utama yang ditemukan dalam koordinasi internal akibat padatnya agenda para pengurus KPPI Provinsi Lampung yang juga aktif dalam jabatan politik, maka disarankan adanya penunjukan tim koordinasi teknis yang terpisah dari struktur formal kepartaian. Hal ini dapat membantu menjaga kesinambungan dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan program pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press
- A. Ropik and W. Wijaya. (2019). Kesadaran Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan: Studi Pada Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 8, No. 2.
- Afriansyah., Afdhal., Mutanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin., Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurrohman. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Akbar, M. F. & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Alfiyah, N. I. & Tini, D. L. R. (2022). Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2021. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1.
- Antara Kantor Berita Indonesia. (2022). Mendukung Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2024. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://www.antaranews.com/infografik/3294983/mendukung-keterwakilan-perempuan-pada-pemilu-2024>
- Argawidianti, T. N., Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2022). Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik: Pendidikan Politik Perempuan dalam Program “Sekoper Cinta” di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. *Civitas Consecratio*, Vol. 2, No. 2.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4, No. 2.
- Beritalampung.id. (2024). Keterwakilan Perempuan di Parlemen Meningkat. Diakses pada 12 Januari 2025, dari <https://lampung.gemapos.id/2341/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-lampung-meningkat>

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Indonesia tahun 2023. Diakses pada 9 Februari 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen), 2019-2024. Diakses pada 10 Oktober 2024, dari <https://lampung.bps.go.id/indicator/40/590/1/keterlibatan-perempuan-diparlemen.html>
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan menurut Jhon Rawls. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1.
- Daryati, D. N. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dengan Menggunakan Model William Dunn. *JPSS: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, Vol. 9, No. 1.
- Desrinelti., dkk. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI: Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1.
- Destemi, S. & Hartati. (2020). Pendidikan Politik Perempuan dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun 2020. *Unri Conference Series: Community Engagement*, Vol. 2.
- Dewi, Dian. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. DI Yogyakarta: Samudra Biru.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fitriyah, N. S., Zain, M. H., & Makki, N. (2024). Penguatan Pendidikan Politik bagi Perempuan sebagai Pilar Demokrasi yang Inklusif (*Strengthening Political Education for Women as a Pillar of Inclusive Democracy*). *Jurnal Abdi Publik*, Vol. 4, No. 1.
- Haiti, D., Fatimah., & Marini. (2024). *Pemberdayaan Politik Perempuan Perspektif Kewarganegaraan Gender: Pemberdayaan Politik Perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perspektif Kewarganegaraan Gender di Kalimantan Selatan*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Haquri, D. D., & Sahab, A. (2023). Perempuan dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur di Pileg 2019. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, Vol. 9, No. 1.

- Inter-Parliamentary Union & UN Women. (2023). *Women in Politics: 2023*. Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2023-03/women-in-politics-2023>
- Irfandi, A., Zamhuri, M., & Aula, R. (2023). The Impact of Affirmative Action in Indonesian Politics: A Study on Women's Representation. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 2.
- Janatun, M., Rosiana, I., Reza, R. K., & Darmawan, I. (2023). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikian*, Vol. 2, No. 3.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, and Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, Vol. 30, No. 3.
- Kupastuntas.co. (2024). 18 Perempuan Duduki Kursi DPRD Lampung, PDI Perjuangan paling banyak. Diakses pada 9 Juni 2025, dari <https://kupastuntas.co/2024/03/15/18-perempuan-duduki-kursi-dprd-lampung-pdi-perjuangan-paling-banyak>
- Kurniasih, D. R., Parawangi, A., & Andriana. (2022). Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kepolisian Sektor Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2.
- Kurniawan, R. C., Maulida, K., & Hertanto. (2021). *Networking Institutionalism* oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam Mengoptimalkan Kebijakan Gender. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 2.
- Khan, N., M. Jawad., et al. (2021). Assessing the Impact of Education on Women's Political Participation in Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, Vol. 7, No. 4.
- Khaz, F. H. & Refdi. (2024). Pendidikan Politik Perempuan sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2.
- Khoiron, M. Nur. (1999). *Pendidikan Politik bagi Warga Negara: Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja*. Yogyakarta: LKIS.
- Lau, E. A. (2023). Efektivitas dan Efisiensi melalui Pemanfaatan RunOut Time (ROT) Method. *Jurnal Exchall (Economic Challenge)*, Vol. 5, No. 1.
- Mandarlangi, M. A., Kurnia, I., & Alamsyah, M. N. (2024). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 3.

- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja
- Miles, M.B, Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Naning, R. (1982). *Pendidikan Politik dan Regenerasi*. Jakarta: LP3ES.
- Nugrahajati, S. D., Soeprapto, A., & Joy, N. (2023). Digital Political Education Falls Short: Improving Content for Early Voters. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research: Proceedings of the International Conference on Advance Research in Social and Economic Science (ICARSE 2022)*.
- Nurdin & Fatkhuri. (2022). Pelatihan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 4*.
- Nurdin, P. H. (2020). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jambura Law Review, Vol. 1, No. 2*.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Oteyi., Vadukweenem, J., et al. (2023). Impact of Education on Women in Politics for National Development: African Experience. *Rivers State University of Education Conference Journal, Vol. 3, No. 2*.
- Peta Tematik Indonesia. (2013). Peta Administrasi Provinsi Lampung. Diakses pada 6 Mei 2025, Dari <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/03/21/administrasi-provinsi-lampung/>
- Pinilih, S. A. G. (2020). Gender Specificity in Democratic Elections: International Implementability as an Exemplary for Indonesian Political Landscape. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 9 (3)*.
- Purwanti, A. & Setiawan, F. A. (2020). The Challenges of Women Contribution in Policymaking and How They Overcome It: An Indonesian Study. *Advances in Social Science, Education, and Humanity Research: Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*.
- Rahmah, S. (2021). Pendidikan Politik bagi Perempuan. *Saree: Research in Gender Studies, Vol. 3, No. 1*.
- Rihi, R. R. & Poerwandari, E. K. (2023). Men's Role within the Women's Movement to Achieve Gender Equality in Indonesia: Threat or Opportunity?. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 10, No. 2*.

- Rona, A. P., Maryanah, T., & Hertanto. (2024). Implementasi Pendidikan Politik pada Kelompok Tunawisma di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024. *Jurnal Publicuho*, Vol. 7, No. 4.
- Suchman, E. A., (1967). *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Programs*. USA: Russel Sage Foundation.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suryanef., Al Rafni., & Azizah, C. N. (2022). Rekonseptualisasi Konstruksi Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Perempuan Berdasarkan Kompetensi Gender dan Kebutuhan. *IRJE: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 2.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Squires, J. (2000). *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press
- Tresiana, N. & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wangsih., Karina, R. N., & Rahmadanita, A. (2024). Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 50, No. 2.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol 6 No 2: 3-4.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal COPI SUSU: Jurnal Komunikasi, Politik, dan Sosiologi*.
- Zai, Elsa P., & Sari, Novita. (2023). Analisis Pendidikan Politik pada Keterwakilan Perempuan di DPRA Periode 2019-2024. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 8, No. 2.